
Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa dan Keterbukaan Informasi Terhadap Partisipasi Masyarakat Kecamatan Sukanagara

Alit Wiliandani¹, Rachmat²

^{1,2}Ilmu Pemerintahan, STISIP Guna Nusantara Cianjur

e-mail: alitwiliandani8@gmail.com

Informasi Artikel:

Terima: 20-09-2025

Revisi: 25-11-2025

Disetujui: 07-01-2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak akuntabilitas dana desa dan transparansi informasi publik terhadap partisipasi masyarakat di Kecamatan Sukanegara. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan desain penelitian eksplanatori, penelitian ini melibatkan 170 responden yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data dianalisis menggunakan metode *Structural Equation Modeling* berbasis Partial Least Square (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Ini menunjukkan bahwa semakin baik pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran, semakin tinggi tingkat partisipasi warga dalam pembangunan. Selain itu, transparansi informasi publik juga terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Kemudahan akses informasi mengenai program dan anggaran desa menjadi faktor penting yang mendorong warga untuk berperan serta dalam pengawasan dan pelaksanaan kegiatan. Secara keseluruhan, kedua variabel tersebut mampu menjelaskan variasi partisipasi masyarakat sebesar 88,4%, dengan tingkat validitas prediktif model yang kuat. Temuan ini menegaskan pentingnya memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel untuk menciptakan hubungan kemitraan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat demi keberlanjutan pembangunan desa.

Kata Kunci: Akuntabilitas Dana Desa, Keterbukaan Informasi Publik, Partisipasi Masyarakat.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the impact of village fund accountability and public information transparency on community participation in Sukanegara District. Using a quantitative approach and an explanatory research design, the study involved 170 respondents selected through purposive sampling techniques. Data were analyzed using the Structural Equation Modeling method based on Partial Least Square (SEM-PLS). The results indicate that village fund accountability has a positive and significant effect on community participation. This shows that the better the village government's accountability in managing the budget, the higher the level of citizens' participation in development. In addition, transparency of public information also has a proven positive and significant effect on community participation. Easy access to information about village programs and budgets is an important factor that encourages residents to take part in monitoring and implementing activities. Overall, these two variables are able to explain 88.4% of the variation in community participation, with a strong level of predictive validity for the model. These findings emphasize the importance of

strengthening transparent and accountable village governance to create a harmonious partnership between the government and the community for sustainable village development.

Keywords: Village Fund Accountability, Public Information Disclosure, Community Participation.

PENDAHULUAN

Dana desa telah menjadi alat kebijakan desentralisasi yang signifikan untuk memajukan pembangunan desa dan memberdayakan masyarakat melalui alokasi anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Desa. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, keterbukaan informasi, serta partisipasi masyarakat merupakan elemen penting untuk mencapai efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program-program desa. Secara empiris, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, dan keterbukaan informasi berkontribusi terhadap akuntabilitas dan kinerja pengelolaan dana desa di berbagai konteks kecamatan dan desa di Indonesia (Bahuwa et al., 2025; Juniarti et al., 2022; Setiadi et al., 2025). Di samping itu, literatur juga menyoroti pentingnya kerangka tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan peran kolaboratif antara pemerintah desa dengan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan dana desa (Liani & Takari, 2024; Yanti et al., 2024). Fenomena ini relevan untuk memperdalam pemahaman bagaimana akuntabilitas dana desa dan keterbukaan informasi mempengaruhi partisipasi masyarakat di tingkat kecamatan, khususnya di Kecamatan Sukanegara.

Keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat bukan hanya merupakan elemen etis, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme praktis yang dapat meningkatkan kepercayaan publik serta legitimasi dalam pengelolaan dana desa. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik dan partisipasi masyarakat berdampak positif terhadap akuntabilitas dan kinerja pengelolaan dana desa di berbagai lokasi penelitian di Indonesia (Ayuba, 2023; Lollo et al., 2024). Namun, beberapa temuan menunjukkan nuansa yang perlu dicermati: adanya perbedaan konteks desa/kecamatan, serta peran teknologi informasi (TI) dan variabel moderasi lain sebagai pemediasi/pengubah hubungan antara variabel utama. Misalnya, studi mengenai pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas menunjukkan bahwa TI bisa berperan positif maupun negatif tergantung konteks implementasi dan intervensi partisipasi publik (Aurelia et al., 2023; Ayem & Rahmawati, 2024).

Secara fenomenal, terdapat praktik keterbukaan informasi yang belum optimal di banyak desa. Penelitian deskriptif kualitatif menunjukkan bahwa meskipun prinsip transparansi telah diatur melalui kebijakan, implementasi keterbukaan informasi, pelaporan, dan akses publik terhadap informasi dana desa belum sepenuhnya optimal karena kendala sumber daya manusia, arus informasi, dan adopsi media informasi digital desa (Bahuwa et al., 2025; Lollo et al., 2024). Hal ini berdampak pada kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dana desa. Sejumlah studi juga menunjukkan bahwa meskipun partisipasi masyarakat dianggap penting untuk akuntabilitas, kenyataan di lapangan menunjukkan variasi tingkat partisipasi yang bisa berdampak pada persepsi akuntabilitas oleh warga desa (Shagita & Indriani, 2023; Yanti et al., 2024).

Beberapa permasalahan utama yang relevan dengan topik ini dimana hubungan antara partisipasi masyarakat, akuntabilitas dana desa, dan keterbukaan informasi menunjukkan hasil yang beragam. Pengelolaan dana desa di Kecamatan Sukanegara menghadapi tantangan serius terkait rendahnya keterlibatan warga dalam pengawasan dan perencanaan pembangunan.

Fenomena ini diduga berakar pada dua kendala utama. Pertama, mekanisme akuntabilitas yang belum berjalan optimal, di mana laporan pertanggungjawaban seringkali dianggap sebagai formalitas administratif tanpa substansi yang dapat dipahami publik. Kedua, saluran keterbukaan informasi publik masih sangat terbatas, akses masyarakat terhadap rincian anggaran dan realisasi program sering kali terhambat oleh kurangnya transparansi perangkat desa. Kondisi ini menciptakan defisit kepercayaan (*trust deficit*) yang menghambat inisiatif warga untuk berpartisipasi aktif. Beberapa studi menemukan pengaruh positif dan signifikan dari partisipasi terhadap akuntabilitas dana desa, sementara studi lain menunjukkan dampak partisipasi yang tidak signifikan atau bergantung pada variabel moderasi/mediasi tertentu (Hafizatunnisa & Firdaus, 2024; Yusnita & Salfutra, 2021).

Meskipun ada sejumlah studi yang membahas hubungan antara akuntabilitas dana desa, keterbukaan informasi, dan partisipasi masyarakat di berbagai desa/kecamatan di Indonesia, terdapat kekurangan literatur yang secara empiris mengeksplorasi hubungannya secara komprehensif dalam konteks Kecamatan Sukanegara, dengan fokus pada bagaimana akuntabilitas dana desa dan keterbukaan informasi mempengaruhi partisipasi masyarakat secara bersamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab apakah penguatan akuntabilitas dan transparansi informasi secara simultan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di wilayah tersebut khususnya Kecamatan Sukanegara.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (Agency Theory) dan Teori Stewardship

Teori Keagenan (*Agency Theory*) mempelajari hubungan kontraktual antara prinsipal (pemilik/modal) dan agen (manajer/pelaksana), dengan fokus pada asimetri informasi, insentif, dan biaya keagenan. Konsepnya menekankan potensi konflik kepentingan serta kebutuhan mekanisme pengawasan dan kontrak yang align dengan tujuan prinsipal (Tekin & Polat, 2020). Stewardship Theory memandang agen sebagai stewards yang termotivasi untuk mencapai tujuan bersama prinsipal, didorong oleh kepercayaan, integritas, dan orientasi pada nilai organisasi, sehingga hubungan ini bisa beroperasi tanpa cost-like pengawasan yang berat (Lehrer & Segal, 2020). Banyak kajian menunjukkan keduanya tidak eksklusif: keduanya bisa saling melengkapi dan bahkan membentuk kerangka “mutualistic symbiosis” antara teori keagenan dan stewardship, tergantung konteks organisasi dan norma sosialnya (Yan & Hyman, 2024). Praktik tata kelola yang efektif independensi dewan, pemantauan, serta desain insentif yang selaras dengan tujuan jangka panjang dapat mengurangi biaya keagenan dan meningkatkan kinerja perusahaan (Protus & Tuwey, 2024)

Akuntabilitas Dana Desa

Akuntabilitas Dana Desa adalah pertanggungjawaban moral dan hukum atas penggunaan dana publik desa, tidak hanya pelaporan administratif, dengan transparansi dan pengawasan yang melibatkan publik dan lembaga negara (Angela et al., 2024; Helmi & Khoirunurrofik, 2023). Dalam konteks Dana Desa, akuntabilitas bukan sekadar pelaporan administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum atas pengelolaan dana yang bersumber dari APBN. Adapun dalam penelitian ini indikator yang di gunakan akuntabilitas dana desa meliputi (Angela et al., 2024) : (1) Transparansi pengelolaan anggaran dana desa. (2) Sistem pengendalian intern dan kepatuhan. (3) Audit internal dan pengawasan (4) Keterlibatan komunitas dalam pengawasan. (5) Kepatuhan regulasi dan pelaporan tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. (6) Penegakan hukum dan restitusi atas kerugian negara.

Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah hak warga untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan publik dan alasan keputusan, sejalan dengan UU No. 14/2008 yang mendorong partisipasi publik dan pengawasan (Ismawan & Irma, 2024; Suryani et al., 2021). Pemanfaatan portal publik dan kanal digital, termasuk situs PPID dan media sosial, meningkatkan akses informasi (Ismawan & Irma, 2024). KIP juga memerlukan peran *civil society* sebagai pengawas kebijakan dan peran media sebagai watchdog, meski akses dokumen kadang terbatas; kajian menunjukkan kemajuan namun belum memenuhi harapan publik (Khaz et al., 2026; Raifangga et al., 2025). Transformasi digital dan sinergi lintas sektor diperlukan untuk memperluas transparansi dan partisipasi publik, melalui inovasi digital dan diseminasi informasi (Gantika, 2024; Vernanda & Choiriyah, 2025). Hal ini merupakan perwujudan dari transparansi yang memungkinkan pengawasan oleh masyarakat. Dalam penelitian ini indikator keterbukaan informasi publik (KIP) yang relevan bagi kebijakan dan praktik desa, disintesis meliputi (Arianto, 2023): (1) Pengumuman Informasi Berkala. (2) Ketersediaan Informasi Setiap Saat. (3) Kecepatan Pelayanan Informasi. (4) Aksesibilitas Media. (5) Kejelasan dan Kemudahan Informasi.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat melibatkan keaktifan warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan secara bersama-sama, sehingga aspirasi komunitas dapat terwakili dan akuntabilitas tetap terjaga (Rustan & Irwansyah, 2023). Konsep ini didukung oleh kerangka konstitusional dan normatif di Indonesia yang menekankan hak warga untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pembangunan desa serta dalam pembentukan kebijakan daerah (Solehudin et al., 2024). Secara praktik, partisipasi juga dipandang sebagai bagian dari upaya pemberdayaan komunitas dalam berbagai program pembangunan yang melibatkan aktor lokal secara langsung serta sebagai fondasi bagi tata kelola yang responsif terhadap kebutuhan lokal (Rochman et al., 2023). Dalam penelitian ini partisipasi masyarakat dapat diukur melalui indikator (Noya, 2022) yaitu: (1) Kontribusi ide/pikiran, tenaga, waktu, dana, dan material dalam perencanaan maupun pelaksanaan program. (2) Keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh warga atau kelompok warga, sebagai bentuk penerapan partisipasi di tingkat implementasi. (3) Pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan program oleh publik, sebagai mekanisme akuntabilitas sosial. (4) Akses informasi dan ketersediaan ruang partisipasi (forum, musyawarah, pertemuan) yang memungkinkan warga menyampaikan pendapat secara langsung maupun melalui perwakilan. (5) Kemampuan masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara lisan maupun tertulis, serta partisipasi dalam forum-forum keputusan. (6) Partisipasi dalam seluruh tahap: perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi, yang menunjukkan tingkat partisipasi dan kualitas demokrasi lokal.

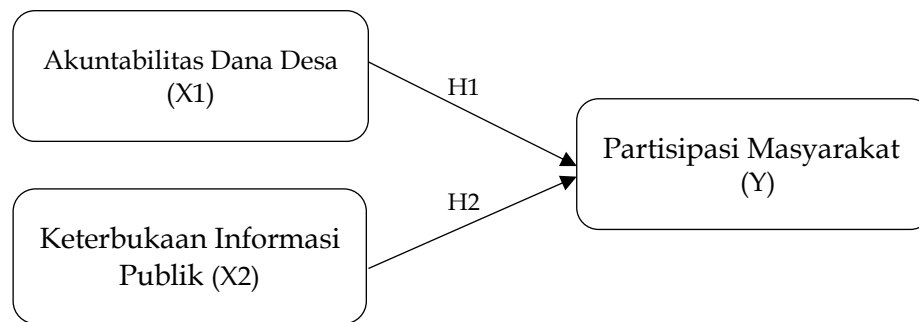
Pengembangan Hipotesis

Pengembangan hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada perspektif Teori Keagenan (Agency Theory) dan Teori Stewardship yang menempatkan transparansi dan tanggung jawab pemerintah desa sebagai faktor kunci yang memengaruhi perilaku masyarakat. Hipotesis disusun untuk menguji hubungan antarvariabel penelitian (Setiadi et al., 2025), serta menjelaskan kemungkinan pengaruh akuntabilitas dan keterbukaan informasi terhadap penguatan partisipasi masyarakat yang dapat dibuktikan secara empiris sesuai dengan konteks penelitian di Kecamatan Sukanegara.

H1: Akuntabilitas Dana Desa berpengaruh positif terhadap Partisipasi Masyarakat

H2: Keterbukaan Informasi Publik berpengaruh positif terhadap Partisipasi Masyarakat.

Kerangka penelitian ini dirancang untuk menggambarkan hubungan antarvariabel yang disusun berdasarkan landasan teori akuntansi sektor publik serta hasil penelitian sebelumnya. Penyajian ini bertujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai arah dan pola keterkaitan antarvariabel, sehingga proses pengaruh yang terjadi dapat dipahami secara logis, sistematis, dan terstruktur sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

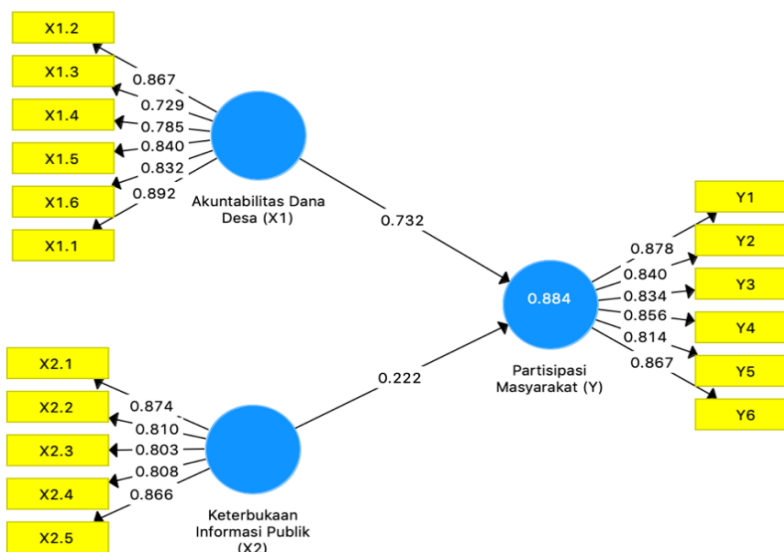
Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian eksplanatori yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antarvariabel melalui pengujian hipotesis secara empiris (Mafriningsianti & Setiadi, 2025). Pendekatan ini dipilih untuk mengukur pengaruh akuntabilitas dana desa dan keterbukaan informasi terhadap partisipasi masyarakat secara objektif melalui analisis statistik. Unit analisis penelitian adalah masyarakat di wilayah Kecamatan Sukanegara, Kabupaten Cianjur, yang menjadi sasaran program pembangunan dan pengguna manfaat dari pengelolaan dana desa. Populasi penelitian terdiri dari semua warga negara yang tinggal di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Sukanegara. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode non-probability sampling menggunakan pendekatan purposive sampling, di mana responden dipilih berdasarkan kriteria berikut: (1) Penduduk yang merupakan warga tetap Kecamatan Sukanegara, (2) Berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah, dan (3) Pernah terlibat atau memiliki pengetahuan tentang program pembangunan desa di daerah mereka.

Penentuan ukuran sampel mengikuti metode yang diusulkan oleh Hair et al., yaitu 5–10 kali jumlah indikator penelitian (Sarstedt, 2019). Dalam penelitian ini, terdapat 17 indikator, sehingga 17 dikalikan 10 menghasilkan total sampel sebanyak 170 responden untuk memastikan kekuatan statistik yang memadai. Data penelitian terdiri dari data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarluaskan secara daring dan luring, serta data sekunder yang diperoleh dari laporan APBDDes, literatur ilmiah, dan dokumen terkait lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner tertutup yang menggunakan skala Likert 1–5. Analisis data dilakukan dengan menggunakan SEM berbasis Partial Least Square (PLS) melalui uji outer

model, inner model, koefisien jalur, dan bootstrapping untuk menguji pengaruh langsung antarvariabel sesuai dengan model hipotesis yang diajukan (Setiadi, 2026).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan teknik Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS) untuk menganalisis hubungan antara 17 variabel manifest dan 3 variabel laten. Evaluasi dilakukan dalam dua tahap: model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model). Validitas instrumen diukur dengan kriteria validitas konvergen (outer loading $\geq 0,70$ dan AVE $\geq 0,50$) serta validitas diskriminan. Keandalan model dipastikan melalui Composite Reliability dan Cronbach’s Alpha dengan ambang batas $\geq 0,70$. Metode SEM-PLS dipilih karena fleksibilitasnya dalam menangani model kompleks serta efisiensinya dalam memproses ukuran sampel moderat untuk menghasilkan estimasi yang reliabel (Maulana et al.,2025).



Gambar 2. PLS Algoritma

Sumber: diolah SMART PLS3 (2025)

Berdasarkan gambar 2, hasil analisis menunjukkan bahwa semua indikator pada ketiga variabel memiliki nilai loading factor lebih dari 0,70. Pada variabel Akuntabilitas Dana Desa (X1), indikator X1.1 merupakan refleksi terkuat dengan nilai 0,892. Untuk Keterbukaan Informasi Publik (X2), indikator X2.1 mendominasi dengan nilai 0,874. Sementara itu, pada Partisipasi Masyarakat (Y), indikator Y1 memberikan kontribusi terbesar dengan nilai 0,878. Hal ini membuktikan bahwa semua indikator memenuhi syarat validitas konvergen, sehingga sangat akurat dalam mengukur masing-masing variabel latennya.

Tabel 1. Hasil Uji AVE, CA, dan CR

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Akuntabilitas Dana Desa (X1)	0,682	0,906	0,928
Keterbukaan Informasi Publik (X2)	0,693	0,889	0,919
Partisipasi Masyarakat (Y)	0,720	0,922	0,939

Sumber: diolah SMART PLS3 (2025)

Berdasarkan tabel 1. Pengujian, ketiga variabel yaitu Akuntabilitas Dana Desa, Keterbukaan Informasi Publik, dan Partisipasi Masyarakat dinyatakan valid dan reliabel. Nilai Average Variance Extracted atau AVE dari semua variabel melebihi 0,50, menunjukkan validitas konvergen yang baik. Selain itu, nilai Cronbach Alpha dan Composite Reliability juga melampaui batas minimum standar yaitu 0,70. Hasil ini menegaskan bahwa semua instrumen pengukuran yang digunakan memiliki tingkat konsistensi dan keandalan yang sangat tinggi untuk analisis data tahap selanjutnya.

Tabel 2. Cross Loading Factor

Indikator	Akuntabilitas Dana Desa (X1)	Keterbukaan Informasi Publik (X2)	Partisipasi Masyarakat (Y)
X1.1	0,892	0,833	0,875
X1.2	0,867	0,799	0,788
X1.3	0,729	0,696	0,676
X1.4	0,785	0,685	0,716
X1.5	0,840	0,753	0,793
X1.6	0,832	0,779	0,775
X2.1	0,767	0,874	0,797
X2.2	0,750	0,810	0,749
X2.3	0,739	0,803	0,700
X2.4	0,740	0,808	0,703
X2.5	0,830	0,866	0,773
Y1	0,820	0,771	0,878
Y2	0,787	0,731	0,840
Y3	0,786	0,748	0,834
Y4	0,799	0,773	0,856
Y5	0,753	0,737	0,814
Y6	0,820	0,796	0,867

Sumber: diolah SMART PLS3 (2025)

Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat dilihat bahwa nilai korelasi (loading) setiap indikator dengan variabel konstruksya sendiri (angka yang dicetak tebal) lebih tinggi dibandingkan dengan nilai korelasi indikator tersebut dengan variabel konstruk lainnya (cross loading). Ini menunjukkan bahwa semua indikator telah memenuhi syarat validitas diskriminan dengan baik.

Tabel 3. Hasil R Square

Variabel	R Square
Partisipasi Masyarakat (Y)	0,884

Sumber: diolah SMART PLS3 (2025)

Berdasarkan tabel 3, nilai R Square sebesar 0,884 mengindikasikan bahwa variabel independen dapat menjelaskan variasi dalam variabel Partisipasi Masyarakat (Y) sebesar 88,4%. Sementara itu, 11,6% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang berada di luar model penelitian yang dianalisis dalam studi ini.

Predictive Relevance

Dalam pendekatan PLS-SEM, nilai Q2 berfungsi mengukur validitas prediktif model. Hasil positif menunjukkan model mampu memprediksi data observasi dengan baik. Secara spesifik, nilai di atas 0,25 mencerminkan kemampuan prediksi moderat, sementara nilai melampaui 0,50 mengindikasikan relevansi substantif yang kuat dalam menjelaskan model penelitian (Setiadi et al., 2025).

Tabel 4. Q-square

Variabel	SSO	SSE	Q ² (=1- SSE/SSO)
Partisipasi Masyarakat (Y)	1020,000	376,960	0,630

Sumber: diolah SMART PLS3 (2025)

Berdasarkan tabel 4, nilai Q2 untuk variabel Partisipasi Masyarakat (Y) tercatat sebesar 0,630. Karena angka ini melebihi 0,50, model tersebut menunjukkan validitas prediktif yang kuat dan relevansi substantif yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa model tersebut mampu memprediksi data observasi dengan akurat dan berdasarkan bukti empiris.

Pengujian Model Struktural (Inner Model) bertujuan untuk menilai hubungan antara variabel laten dalam penelitian ini. Melalui analisis nilai koefisien jalur, peneliti dapat mengidentifikasi kekuatan sekaligus arah pengaruh dari setiap variabel yang diuji. Selain itu, teknik *bootstrapping* digunakan untuk menentukan tingkat signifikansi statistik secara akurat. Langkah ini krusial untuk memastikan apakah hipotesis yang diajukan terbukti memiliki dampak nyata atau tidak secara empiris (Maulana et al., 2025b).

Tabel 5. Uji Signifikan Jalur (Path)

Variabel	Original Sample (O)	T Statistics (O/STDEV)	P Values	Keterangan
Akuntabilitas Dana Desa (X1) -> Partisipasi Masyarakat (Y)	0,732	12,859	0,000	Berpengaruh
Keterbukaan Informasi Publik (X2) -> Partisipasi Masyarakat (Y)	0,222	3,629	0,000	Berpengaruh

Sumber: diolah SMART PLS3 (2025)

Berdasarkan tabel 5 mengenai hasil pengujian model struktural (inner model), berikut adalah penafsiran hipotesis untuk setiap variabel:

1. H1: Akuntabilitas Dana Desa (X1) terhadap Partisipasi Masyarakat (Y). Variabel Akuntabilitas Dana Desa menunjukkan nilai koefisien jalur (Original Sample) sebesar 0,732 dengan arah positif. Nilai T-Statistic sebesar 12,859 ($> 1,96$) dan P-Value sebesar 0,000 ($< 0,05$) mengindikasikan bahwa Akuntabilitas Dana Desa memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap Partisipasi Masyarakat. Oleh karena itu, H1 diterima.
2. H2: Keterbukaan Informasi Publik (X2) terhadap Partisipasi Masyarakat (Y). Variabel Keterbukaan Informasi Publik memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,222 dengan arah positif. Nilai T-Statistic sebesar 3,629 ($> 1,96$) dan P-Value sebesar 0,000 ($< 0,05$) menegaskan bahwa Keterbukaan Informasi Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Partisipasi Masyarakat. Dengan demikian H2 diterima, Secara keseluruhan,

kedua variabel independen terbukti menjadi pendorong penting bagi keterlibatan publik dalam pembangunan desa.

Pembahasan

Hasil dari pengujian hipotesis pertama (H1) menunjukkan bahwa Akuntabilitas Dana Desa (X1) memiliki dampak positif dan signifikan secara statistik terhadap Partisipasi Masyarakat (Y), dengan koefisien jalur sebesar 0,732 dan P-Value 0,000. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik pertanggungjawaban moral dan hukum dalam penggunaan dana publik desa, semakin tinggi pula keinginan warga untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Secara empiris, indikator refleksi terkuat pada variabel ini adalah transparansi pengelolaan anggaran (X1.1) dengan nilai loading 0,892, yang menegaskan bahwa akuntabilitas bukan hanya formalitas administratif, tetapi juga alat untuk membangun kepercayaan publik. Hasil ini konsisten dengan penelitian Aurelia et al. (2023) yang menyatakan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berkontribusi langsung pada efektivitas program melalui intervensi partisipasi publik. Selain itu, Angela et al. (2024) memperkuat argumen ini dengan menyatakan bahwa sistem pengendalian intern dan pengawasan yang akuntabel mendorong keterlibatan komunitas dalam memantau kinerja pemerintah desa.

Hasil dari pengujian hipotesis kedua (H2) mengindikasikan bahwa Keterbukaan Informasi Publik (X2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Partisipasi Masyarakat (Y), dengan koefisien sebesar 0,222 dan P-Value 0,000. Meskipun pengaruhnya tidak sebesar akuntabilitas, keterbukaan informasi tetap menjadi elemen kunci yang memungkinkan masyarakat mengakses rincian anggaran dan realisasi program. Indikator pengumuman informasi secara berkala (X2.1) menjadi faktor dominan dengan nilai 0,874, yang membuktikan bahwa aksesibilitas data adalah fondasi bagi tata kelola yang responsif. Temuan ini didukung oleh penelitian Ayuba (2023) dan Lollo et al. (2024) yang menemukan bahwa transparansi informasi publik berdampak positif pada kinerja pengelolaan dana desa karena mampu memitigasi defisit kepercayaan (trust deficit) di tengah masyarakat. Lebih lanjut, Gantika (2024) menekankan bahwa transformasi digital dan diseminasi informasi melalui media sosial sangat diperlukan untuk memperluas ruang partisipasi warga secara inklusif.

Secara simultan, model penelitian ini memiliki nilai R Square sebesar 0,884, yang berarti akuntabilitas dan keterbukaan informasi mampu menjelaskan variasi partisipasi masyarakat sebesar 88,4%. Nilai Q2 sebesar 0,630 ($> 0,50$) juga mengonfirmasi bahwa model ini memiliki validitas prediktif yang kuat dan relevansi substantif yang tinggi dalam memprediksi data observasi di Kecamatan Sukanegara. Hal ini memperkuat penerapan Teori Stewardship, di mana pemerintah desa yang berintegritas mampu memotivasi masyarakat sebagai mitra pembangunan untuk mencapai tujuan bersama tanpa pengawasan yang kaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis penelitian di Kecamatan Sukanegara, beberapa kesimpulan utama dapat diambil mengenai cara meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan desa. Pertama, akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa terbukti menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pembangunan. Tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola anggaran dengan jujur dan transparan menumbuhkan kepercayaan yang kuat di kalangan warga. Ketika pelaporan penggunaan dana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun hukum, masyarakat merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk berkontribusi nyata, baik dalam bentuk ide, tenaga, maupun waktu. Kedua, keterbukaan informasi publik memainkan peran penting dalam

memastikan akses warga terhadap detail kebijakan dan anggaran desa. Kemudahan masyarakat dalam mendapatkan rincian pelaksanaan program melalui berbagai saluran komunikasi membantu menghilangkan hambatan akses yang sering terjadi. Informasi yang disajikan secara berkala dan mudah dipahami memungkinkan warga untuk melakukan pengawasan secara mandiri, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Secara keseluruhan, penguatan aspek akuntabilitas dan transparansi secara bersamaan merupakan strategi yang sangat efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Model penelitian ini sangat baik dalam menjelaskan fenomena partisipasi di lapangan. Pemerintah desa diharapkan tidak lagi melihat laporan keuangan hanya sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai alat komunikasi untuk membangun kemitraan yang harmonis dengan seluruh lapisan masyarakat demi tercapainya tujuan pembangunan desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Angela, Lia, Said, Miah, & Faridah, Faridah. (2024). Pengaruh Audit Internal Dan Pengawasan Terhadap Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Taora Kecamatan Buntu Malangka Kabupaten Mamasa. *Access Journal of Accounting Finance and Sharia Accounting*, 2(2), 133–138. <https://doi.org/10.56326/access.v2i2.2834>
- Arianto, Bambang. (2023). Tata Kelola Media Sosial Sebagai Institusionalisasi Praktik Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Indonesia. *Akuntansi Dan Teknologi Informasi*, 16(2), 106–127. <https://doi.org/10.24123/jati.v16i2.5644>
- Aurelia, Dila, Sudirman, Rismawati, & Hapid, Hapid. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Inventory Jurnal Akuntansi*, 7(1), 25. <https://doi.org/10.25273/inventory.v7i1.16183>
- Ayem, Sri, & Rahmawati, Lina. (2024). Pengujian Pemoderasi Azas Tri Pantangan Terhadap Sistem Informasi Akuntansi Dan Partisipasi Masyarakat Pada Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 13(02), 377–389. <https://doi.org/10.22437/jmk.v13i02.31656>
- Ayuba, Udin Hamim Nurhayati A. (2023). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. *Journal Economy and Currency Study (Jecs)*, 5(1), 129–144. <https://doi.org/10.51178/jecs.v5i1.1588>
- Bahuwa, Tiara O., Aneta, Asna, & Agussalim, Alfiyah. (2025). Penerapan Nilai-Nilai Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Dulohupa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. *Riggs Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 2937–2943. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.954>
- Gantika, Soma. (2024). Transformasi Digital: Meningkatkan Transparansi Dan Partisipasi Dalam Administrasi Publik. *Journal of Economic Bussines and Accounting (Costing)*, 7(6), 9271–9283. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i6.13931>
- Hafizatunnisa, & Firdaus, Muhammad R. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Desa Bongkang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. *Japb*, 7(2), 1774–1790. <https://doi.org/10.35722/japb.v7i2.1116>

- Helmi, Sayid Reza, & Khoirunurrofik, Khoirunurrofik. (2023). Does Village Fund Audit Affect Village Development? An Empirical Study of Villages in Aceh Province. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 9(2), 247–270. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v9i2.1286>
- Ismawan, Dana, & Irma, Ade. (2024). Pemanfaatan Website Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik. *Wathan Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 158–175. <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i2.70>
- Juniarti, Ulvia, Inapty, Biana Adha, & Rakhmawati, Intan. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Labuhan Haji Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 608–620. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i3.298>
- Khaz, Fitra Hadi, Jusri, Rachmania, Soraya, Aulia, Pratiwi, Adila, & Chandra, Najwa Ramadhani. (2026). Peran Civil Society Dalam Mengawal Transparansi Kebijakan Publik Di Indonesia. *Jurnal Iso Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora*, 6(1), 22. <https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3623>
- Lehrer, Mark, & Segal, Lydia. (2020). The Stewardship Organization: Essential Characteristics and Conditions of Feasibility. *American Journal of Business*, 35(3/4), 175–190. <https://doi.org/10.1108/ajb-04-2020-0046>
- Liani, Yully, & Takari, Dedi. (2024). Analisis Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(11), 4810–4825. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i11.1760>
- Lollo, Petrichia E., Tameno, Nikson, Tiwu, Maria I. H., & Angi, Yohana F. (2024). Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(09), 3694–3705. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1170>
- Mafriningsianti, Evi, & Setiadi, Sandi. (2025). Transformation of Smes in West Java: Building National Economic Resilience Through Digital Innovation. *Branding: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 4(2 SE-Articles), 1–24. <https://doi.org/10.15575/jb.v4i2.51590>
- Maulana, Rizky, Alhidayatullah, Alhidayatullah, & Setiadi, Sandi. (2025a). MSME Sustainability Strategy Through the Application of Digital Marketing and Product Innovation in the VUCA Era: A Study of SMEs in Sukabumi City. *International Journal of Economics, Management and Accounting (IJEMA)*, 3(4 SE-Articles), 366–383. <https://doi.org/10.47353/ijema.v3i4.346>
- Maulana, Rizky, Alhidayatullah, & Setiadi, Sandi. (2025b). Digital Adaptation Strategies for MSMEs in the Vuca Era: A Study of SMEs in Sukabumi City. *International Journal of Science and Society*, 7(3 SE-Articles). <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v7i3.1521>
- Noya, Josephus. (2022). Proses Demokratisasi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Pada Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Seram Bagian Barat. *Journal of Government Science Studies*, 1(2), 95–104. <https://doi.org/10.30598/jgssvol1issue2page95-104>
- Protus, Chepkwony, & Tuwey, Joel Kiplagat. (2024). Board Independence, CEO Tenure, and Private Firm Performance in Nairobi, Kenya. *International Journal of Emerging Trends in Social Sciences*, 16(1), 22–31. <https://doi.org/10.55217/103.v16i1.728>
- Raifangga, Mochammad Candra, Husnayain, Nurul, Rahmatussalimah, Rahmatussalimah,

- Hasibuan, Shella Chairani, Masyropah, Syifa, Sarah, Sylvania, & Latifah, Aeni. (2025). Peran Media Dan Partisipasi Publik Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pejabat Publik Terhadap Praktik Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 5(1), 529–538. <https://doi.org/10.54082/jupin.1231>
- Rochman, Gina Puspitasari, Akliyah, Lely Siddatul, Fardani, Irland, Tarlani, Tarlani, Hamada, Faizal, & Nurhasanah, Halimah. (2023). Effect of Community Participation Levels on Tourism Village Development. *Kne Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i18.14371>
- Rustan, Ahmad, & Irwansyah, Irwansyah. (2023). Enigma of the Idea From Extending the Village Head Period: Orientation and Implications in a Constitutional Perspective. *Sasi*, 29(4), 740. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i4.1720>
- Sarstedt, Marko. (2019). *Revisiting Hair Et al.'s Multivariate Data Analysis: 40 Years Later*. Springer.
- Setiadi, Sandi. (2026). *Enhancing Customer Loyalty: The Mediating Effect of Experience on Usability, Security, and Content Quality with Digital Literacy Moderation*. 14(1), 1513–1526. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v14i1.4909>
- Setiadi, Sandi, Alhidayatullah, Alhidayatullah, Maulana, Rizky, & Halimatu Sya'diah, Nadia. (2025). The Role of Collaboration and Competitiveness in Improving Business Sustainability. *International Student Conference on Business, Education, Economics, Accounting, and Management (ISC-BEAM)*, 4(2 SE-Articles). Retrieved from <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/isc-beam/article/view/61564>
- Setiadi, Sandi, Maulana, Rizky, & Hidayat, Sarip. (2025). Dampak Pungutan Desa terhadap Aset dan Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Ilmu Manajemen Retail Universitas Muhammadiyah Sukabumi*, 6(2), 160–180. <https://doi.org/10.37150/jimat.v6i2.3732>
- Setiadi, Sandi, Widyastuti, Sri, Zulkifli, & Darmansyah. (2025). Sustainable nature tourism transformation: The strategic role of green tourism in West Java. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 9(3), 1544–1569. <https://doi.org/10.55214/25768484.v9i3.5599>
- Shagita, Alya Fitri, & Indriani, Rini. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu). *Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 3812–3825. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.5593>
- Solehudin, Ending, Fautanu, Idzam, & Rizal, Lutfi Fahrul. (2024). The Value of Community Participation in the Creation of Local Legal Products in Indonesia. *Hanifiya Jurnal Studi Agama-Agama*, 7(1), 99–114. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v7i1.34483>
- Suryani, Dewi Amanatun, Sugiantoro, Hari Akbar, & Tyas, Zahra Arwananing. (2021). Implementasi Standar Layanan Informasi Publik Berbasis Digital Di Desa Girikerto Turi Sleman. *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.18196/ppm.24.460>
- Tekin, Hasan, & Polat, Ali Yavuz. (2020). Agency Theory: A Review in Finance. *Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 8(4), 1323–1329. <https://doi.org/10.18506/anemon.712351>
- Vernanda, Charista Diva, & Choiriyah, Ilmi Usrotin. (2025). Peran Dinas Komunikasi Dan Informatika Dalam Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Sidoarjo. *JDP (Jurnal*

Dinamika Pemerintahan), 8(02), 636–663. <https://doi.org/10.36341/jdp.v8i02.6342>

Yan, Tony, & Hyman, Michael R. (2024). The Principal–agent Problem and Its Mitigation: A Critical Historical Analysis. *Journal of Management History*, 30(4), 615–636. <https://doi.org/10.1108/jmh-07-2023-0068>

Yanti, Pika M., Julica, Lisa A., & Yunita, Herma. (2024). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Pengelolaan Data Desa Dalam Pemanfaatan Dana Desa. *Jurnal Tren Bisnis Global*, 4(2), 119. <https://doi.org/10.38101/jtbg.v4i2.15731>

Yusnita, Maya, & Salfutra, Reko D. (2021). Mengukur Kinerja Pengeolaan Dana Desa Berbasis Kompetensi Melalui Partisipasi Sebagai Variabel Moderasi. *Jrmsi - Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*, 12(2), 278–286. <https://doi.org/10.21009/jrmsi.012.2.05>